

DAFTAR PUSTAKA

- Alsaghier, H., Ford, M., Nguyen, A., & Hexel, R. (2009). Conceptualising Citizen's Trust in e-Government: Application of Q Methodology. *Electronic Journal of E-Government*, 7(4), 295–310.
- Asfa, S., Rosalia, F., & Lilih Muflih, L. (2018). STRATEGI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.
- Budi Pratama, A. (2005). Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi.
- Damanik, M. P., dan Purwaningsih, E. H. (2017). E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 21 (2): 151-164.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving. *Not steering*, 4.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3-10.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead - Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16 (3), 467–494.
- Dwiyanto, Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cetakan kedua.
- Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadli, A. (2022). 53.000 Sertifikat Tanah Dibagikan di Sulawesi Selatan. URL: [53.000 Sertifikat Tanah Dibagikan di Sulawesi Selatan \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)
- Fountain, J. (2004). Prospects for the Virtual State. *University of Tokyo 21st Century COE Program*".
- Gregory Curtin. (2007). A Comparative Analysis of E-Government in Latin America: Applied Findings from United Nations E-Government Readiness Reports, IGI Global Disseminator of Knowledge USA.
- Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indrajit, Richardus Eko. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Instruksi Presiden No. 06 Tahun 2001 Tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informasi Deputy Bidang Telematika
- Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.
- Karjoko, L., Ariandayu, A. (2019). "Implementasi Asas Terjangkau Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo Untuk Mempercepat Pensertifikatan Tanah". *Jurnal Repertorium*.

- KARNAY, S. (2020). PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Hasil Survei PBB, 'e-Government' Indonesia Naik Peringkat. URL: [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Hasil Survei PBB, 'e-Government' Indonesia Naik Peringkat \(menpan.go.id\)](https://www.menpan.go.id/).
- Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Kumorotomo, W. (2008). Pengembangan e-government Untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik Studi Kasus UPIK di Pemkot Yogyakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya. *Konferensi Administrasi Negara, Yogyakarta*.
- Maharani, A. 2021. Kurangi Kunjungan 55 Persen, Aplikasi Sentuh Tanahku Baru Diunduh 112.000 Pengguna. URL: [Kurangi Kunjungan 55 Persen, Aplikasi Sentuh Tanahku Baru Diunduh 112.000 Pengguna \(kompas.com\)](https://www.kompas.com).
- Moleong, Lexy J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik.
- Peraturan Menteri PAN RB No. 06 tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE).
- Peraturan Pemerintah No 18 Pasal 85 Tahun 2021 Tentang Aturan atau Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Poerwandari. (2013). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: LPSP3 UI
- Prasetyaningtias, T., Az-Zahra, H. M., & Brata, A. H. (2018). Analisis usability pada aplikasi mobile e-government layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) dengan heuristic evaluation. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN, 2548, 964X*.
- Rachmad, D. S. (2020). EVALUASI USABILITY APLIKASI SENTUH TANAHKU MENGGUNAKAN METODE HEURISTIC. *IJIS-Indonesian Journal On Information System, 5(1)*.
- Rahardjo, B. (2001). Developing e-government (Membangun e-government).
- Rianto, Budi., Tri Lestari. (2012). Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Rumah.com. 2021. Beberapa Negara Yang Berlakukan Layanan Pertanahan Elektronik Seperti Indonesia. URL: [Beberapa Negara Yang Berlakukan](https://www.rumah.com)

Layanan Pertanahan Elektronik Seperti Indonesia | Pasar Properti | Rumah.com

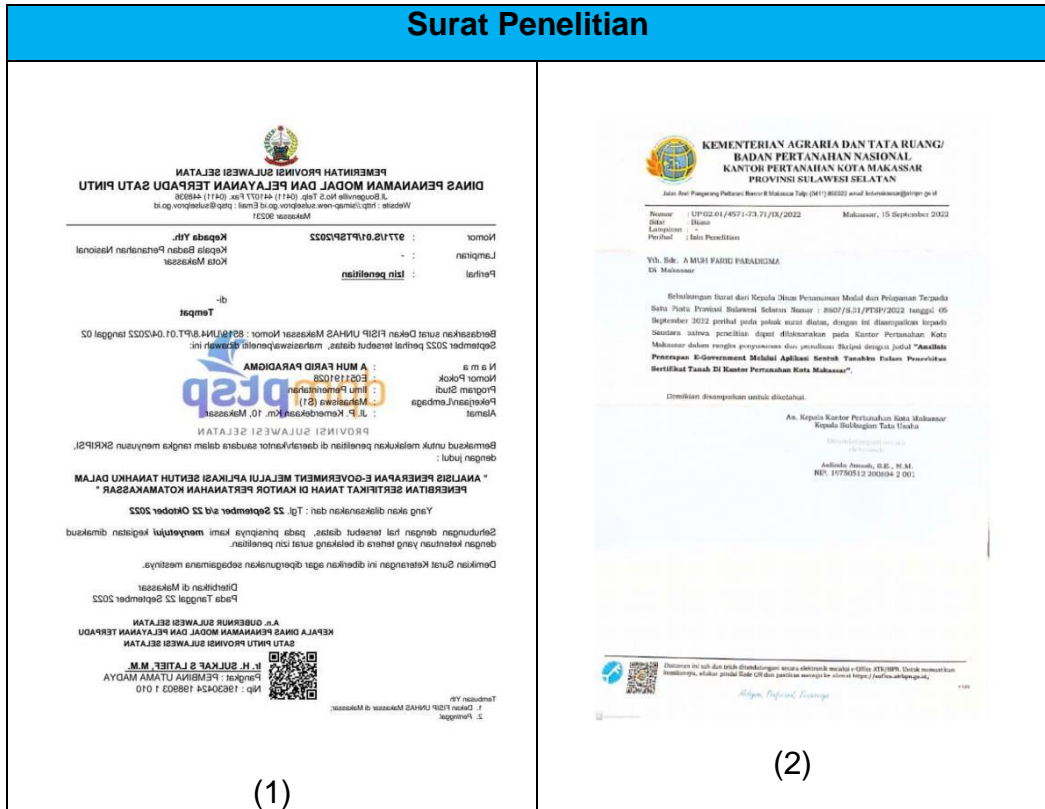
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51-68.
- Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi Cet. V, *PT Bumi Aksara, Jakarta*.
- Subarkah Tri. 2021. Ombudsman Terima 1.612 Laporan terkait Pertanahan selama 2021. URL: [Ombudsman Terima 1.612 Laporan terkait Pertanahan selama 2021 \(mediaindonesia.com\)](#).
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Surdin, J. (2016). Analisis kelayakan implementasi e-government dalam pelayanan publik di bidang keagrariaan di kabupaten pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 178-191.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
- UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Wahyuningsih, D. (2019). Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku. URL: [Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku \(kemenkeu.go.id\)](#)
- West, D. M. (2001). "E-Government and the Transformation of Public Sector Service Delivery ," 64(1), 15–27.
- World Bank, (2002). New-Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.
- Yong. SL. James, (2003). E-Government in Asia, Singapore :Times Editions.
- Kalu, Kalu N. 2019. A Functional Theory of Government, Law, and Institutions. New York: Lexington Book.
- Yunanto, S.E., (2021). MEREBut PEMERINTAH UNTUK KEDAULATAN RAKYAT. *Governabilitas: Volume 2 Nomor 2*
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, pasal 21

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Pendukung Kegiatan

1.1 Surat Keterangan Penelitian

Berikut surat izin penelitian yang didapatkan dari beberapa instansi:



Keterangan:

Surat izin penelitian: (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Kantor Pertanahan Kota Makassar.

1.2 Kantor Kantor Pertanahan Kota Makassar

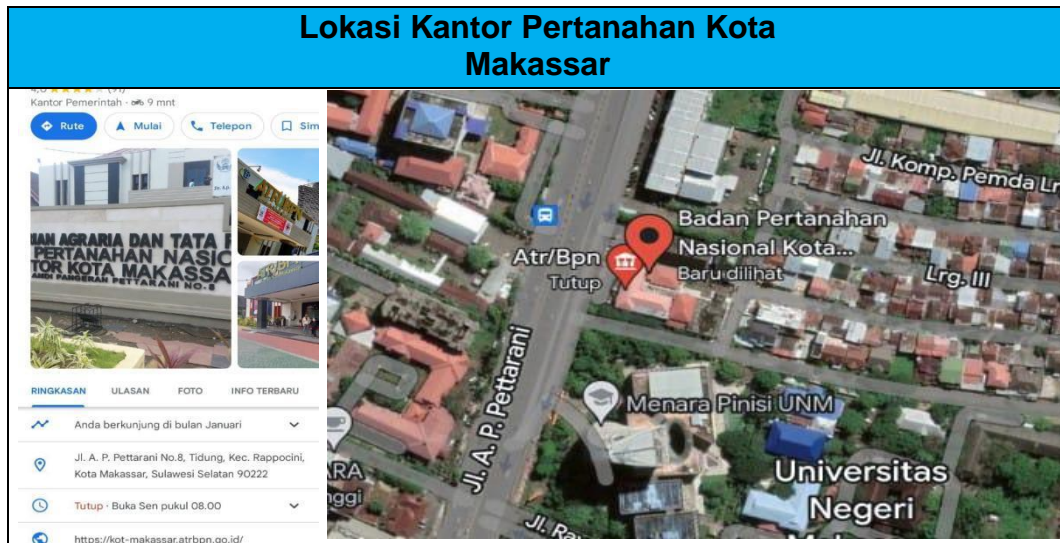
Tampak Depan



Ruangan
koordinator



1.3 Lokasi Kantor Pertanahan Kota Makassar


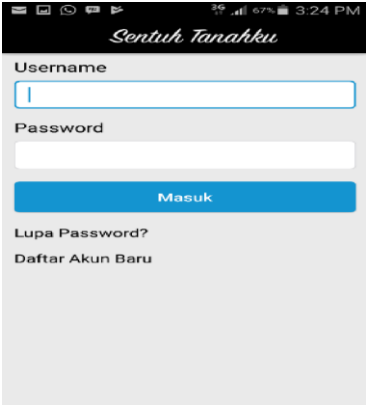



1.4 Dokumentasi Pengumpulan Data

Pengumpulan Data	
	<p>Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Makassar</p>
	<p>Wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan Dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Makassar</p>

	<p>Wawancara Dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan Dan BMN Kantor Pertanahan Kota Makassar.</p>
	<p>Wawancara dengan Masyarakat</p>
	<p>Wawancara dengan Masyarakat</p>

1.5 Aplikasi Sentuh Tanahku

Aplikasi Sentuh Tanahku	
	<p>Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tersedia dalam versi Android dan iOS.</p>
	<p>Halaman Login/Masuk. Untuk masuk dalam aplikasi, pengguna harus memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> dengan benar.</p>
	<p>Menu Info Berkas. Untuk mengetahui berkas yang dimohon pada Kantor Pertanahan, dapat menggunakan menu Info Berkas.</p>

	<p>Menu Info Sertifikat. Menampilkan informasi daftar kepemilikan beserta rincian sertifikat. Jika sertifikat fisik belum tersedia pada daftar kepemilikan sertifikat, pengguna dapat melaporkan informasi sertifikat yang belum tersedia tersebut. Daftar Agunan berfungsi untuk Menampilkan informasi daftar kode agunan dari sertifikat</p>
	<p>Menu Plot Bidang Tanah. Untuk melakukan plotting bidang, pengguna harus memasukkan nomor sertifikat yang akan di plotting.</p>
	<p>Menu Lokasi Bidang Tanah. Pengguna memilih wilayah administrasi dari suatu bidang tanah, kemudian memasukkan jenis hak dan nomor nya.</p>



Menu Info Layanan.

Daftar dan Pencarian Info Layanan: Menyajikan daftar informasi layanan dan disertakan juga fitur pencarian layanan untuk memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi syarat, biaya dan jangka waktu penyelesaian serta simulasi biaya.